PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 23 Palembang Telp. (0711) 356018 - 321181 Fax. (0711) 314586 - 356118
Website : www.bappeda.Sumatera Selatanprov.go.id E-mail : info@bappeda.Sumatera Selatanprov.go.id

NOTULA

Acara	:	Pembahasan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 Tema Tata Kelola Pemerintahan
Hari/Tanggal	:	Kamis / 17 Juli 2025
Waktu	:	15.00 WIB s.d Selesai
Pimpinan Rapat	:	Ir.H. Hendra Gunawan,SH., MM selaku Ketua Pansus 1
Peserta	:	1. H.Ir.Muhammad F Ridho, ST., MT selaku Wakil Ketua Pansus 1 2. Muhamad. Al amin S.Si selaku anggota Pansus 1 3. Alwis Gani, SE., MM selaku anggota Pansus 1 4. Sri Mulyadi, Se., MM selaku anggota Pansus 1 5. AbdullahTaufik, SE., MM selaku anggota Pansus 1 6. H. M. Anwar Al Syadat, S.Si.,M.Si selaku anggota Pansus 1 7. H. Alferenzi Panggarbesi, S.Si selaku anggota Pansus 1 8. Ayu Nur Suri , SE., MM selaku anggota Pansus 1 9. Ir. H. Zulfikri Kadir selaku anggota Pansus 1 10. H. Toyeb Rakembang, S.Ag selaku anggota Pansus 1 11. M. Yansuri, S.IP selaku anggota Pansus 1 12. Imam Mustakim, ST., MT selaku anggota Pansus 1 13. Kepala BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan 14. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan 15. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan 16. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan 17. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan 18. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, diwakili kabid Inovasi dan Teknologi 19. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan 20. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Sumatera Selatan, diwakili Kabag Otonomi Daerah 21. Kepala Biro Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Selatan 22. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Provinsi Sumatera Selatan, diwakili kabag Pembinaan Aparatur 23. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Selatan. 24. Tenaga Ahli (Absensi Terlampir)
Tempat	:	Ruang Rapat Aula Lt. 3 DPRD Provinsi Sumatera Selatan
I. Pembukaan	:	Rapat dibuka dan dipimpin oleh Ir.H. Hendra Gunawan,Sh ., MM selaku Ketua Pansus 1 dan dilanjutkan paparan oleh Regina Ariyanti, ST selaku Kepala BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan.
II. Pembahasan	:	KEPALA BAPPEDA PROVINSI SUMATERA SELATAN Pembahasan Rpjmd Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029: 1. Capaian Indikator Kinerja Daerah Tata Kelola Pemerintahan 2. Permasalahan Pembangunan Sumatera Selatan 3. Isu Strategis Sumatera Selatan 4. Visi, Misi Sumatera Selatan dan Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029 5. 12 Program Strategis HDCU yang berkaitan dengan tata Kelola Pemerintahan yauti pada Program ke 10 serta sinkronisasi terhadap asta cita/Misi RPJMN dan RPJMD.

III. Diskusi : **(15.30 WIB -18.00 WIB)**

TOYEB RAKEMBANG, S.Ag

- Meminta Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Hadir dalam Pansus Pembahasan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029
- RPJMD jangan hanya dijadikan *ceremonial* namun dalam perjalanannya tidak menjadi acuan dalam penganggaran.

Ir.H. HENDARA GUNAWAN,SH., MM selaku Ketua Pansus

- 1Mengingat Upaya dalam meningkatkan kualitas RPJMD maka jangan hanya bagus di awal .
- Menanggapi interupsi Bapak. Toyeb Rakembang, S.A.P bahwa Proses awal pembahasan RPJMD telah berjalan beberapa bulan namun saat ini kita masih melakukan pembahasan bersama OPD dan setelah pembahasan ini selanjutnya Sekretaris Daerah diminta untuk hadir.
- Perlunya diadakan Pelatihan APIP yang berkaitan dengan Pendapatan dan MCP untuk peningkatan PAD.
- Ketika terjadi efisiensi anggaran maka yang terkena dampak pengurangan anggaran pada Pendidikan dan Pelatihan pegawai sehingga Indeks Profesional ASN menurun dan PAD yang dihasilkan oleh BPSDM juga mengalami penurunan.

H.Ir.MUHAMMAD F RIDHO, ST., MT selaku Wakil Ketua Pansus 1

- Rancangan Perda RPJMD telah komprehensif sejak 2-3 bulan di tingkat eksekutif harus disusun sesuai mekanisme yang ada. Pembahasan RPJMD ini menjadi penentu 5 tahun Sumatera Selatan kedepan. Dalam hal ini anggaran juga harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada agar terciptanya reformasi birokrasi yang baik. Namun nyatanya Inovasi daerah dan Reformasi Birokrasi belum optimal.
- Terkait Capaian Indikator, masih banyaknya indikator N/A seperti Indeks Ketentraman dan Ketertiban, Persentase Penegakan Perda . Maka apa yang menjadi penyebab beberapa Indikator tersebut masih N/A?
- Konsistensi dalam peningkatan Pelayanan harus ditingkatkan dan diutamakan karena masih banyaknya ditemui pelaku pelayanan publik belum berkualitas.
- Anggota DPRD harus memeriksa kembali proyeksi anggaran tahun 2025-2030 yang telah disusun oleh Perangkat Daerah.
- Bagaimana terkait proyeksi pendapatan di provinsi Sumatera Selatan yang mana angka dari tahun 2025-2030 tidak adanya peningkatan secara signifikan.
- Lakukan Efisiensi yang benar dalam Perjalanan dinas dengan memperhatikan tujuan Perjalanan Dinas dalam hal ini kuantitas anggota perjalanan dinas yang harus dipertimbangkan. Dibanding melakukan efisiensi waktu dalam perjalanan dinas. Hal ini mempertimbangkan Jarak Perjalanan Dinas yang jauh sehingga lebih baik kuantitas anggota yang dikurangi daripada efisiensi waktu. Maka dari itu efisiensi dilakukan tidak mengurangi kualitas.

AYU NUR SURI , SE., MM

- Proyeksi Pendapatan harusnya meningkat cukup besar, namun proyeksi Pendapatan yang ada di RPJMD dari tahun ke tahun ternyata tidak signifikan. Dengan Proyeksi Pendapatan yang tetap di angka 10 Triliun itu berarti penurunan dan akan menimbulkan efek simultan sehingga perlunya mencari sumber-sumber pendapatan baru.
- Permasalahan Sumatera Selatan, Inovasi daerah masih belum optimal, Reformasi Birokrasi juga belum optimal. Apakah permasalahan ini terjadi pada tahun sebelumnya apa baru terjadi di tahun ini saja? Indikator apa saja yang membuat hal tersebut belum optimal.

- Misi 6 , terkait beberapa program pada misi 6 yang menjadi rancangan. Apakah program program tersebut apakah memang terspesifik pada OPD masing masing? Karena masih belum optimalnya anggaran yang ada di OPD. Misal Membangun transformasi digital, pengembangan jaringan, keamanan *cyber* dan pengembangan sumber daya manusia digital. Namun realitanya baru ada di kabupaten banyuasin dari 17 kabupaten/kota yang ada. Mohon disampaikan apakah program telah dimasukkan dalam sub kegiatan yang ada dikominfo?
- Terkait kemiskinan, perlu ditingkatkan bantuan hukum terhadap Masyarakat miskin karena bantuan hukum gratis masih sangat kurang.
- *Leading sector* pelayanan masyarakat itu biro organisasi. Tingkatkan kembali koordinasi antar OPD misalnya: masih banyaknya pegawai honorer yang belum lulus PPPK sehingga dilakukan optimalisasi. Maka lakukan koordinasi lebih baik kantar OPD .
- Untuk inspektorat, Pendidikan anti korupsi dari Tingkat Taman Kanan-kanak hingga Perguruan Tinggi . Berikan program yang lebih spesifik dalam mendukung program misi 6 HDCU.
- SPBE lebih ditingkatkan kembali agar nilai indeks lebih meningkat kembali di Sumatera Selatan.

Ir.H. HENDRA GUNAWAN,SH., MM selaku Ketua Pansus
- Fokus di 5 tahun kedepan pendapatan tembus di 15 Triliun, Manfaatkan aset dan sumber daya manusianya.
- 5 tahun kedepan dana transfer pusat tidak bisa terlalu diharapkan.
- Seluruh Perda yang ada agar diperbaharui sesuai kondisi saat ini.
- Seluruh Perangkat Daerah harus memberikan kontribusi sekecil apapun dan asset yang dapat menghasilkan agar dapat lebih dioptimalkan.

TOYEB RAKEMBANG, S.Ag
- Seluruh Mitra Komisi harus hadir dalam PANSUS. Baik OPD maupun instansi Vertikal

KEPALA BAPPEDA PROV.SUMATERA SELATAN
- Menanggapi Pertanyaan Wakil Ketua Pansus 1 terkait Indeks yang masih N/A karena ini merupakan indeks baru merujuk dari pusat bahwa 2025 menjadi baseline maka indikator tersebut masih dimasukkan.
- Terkait Pendapatan , akan dilakukan revisi proyeksi pendapatan, karena seharusnya untuk tahun 2025 menggunakan data rancangan APBD-Perubahan sebesaar 11 T. Dan di pansus akan dihadirkan OPD penghasil Retribusi, BUMD Dimana nanti ada deviden yang harus didiskusikan.
- Menanggapi Pertanyaan Wakil Ketua Pansus 1 Skor Indeks Inovasi Daerah di Provinsi Sumatera Selatan, 2018-2024 berfluktuasi. Ini terkait kompetensi SDM dan kurangnya biaya inovasi. Hasil inovasi masih kurang disosialisasikan kepada publik sehingga turun . Dan kurangnya daya inovasi yang belum langsung berpengaruh dengan pertumbuhan ekonomi. Misalnya: Produk Ikan Patin dengan pakacing kalengan.

AYU NUR SURI , SE., MM
- Inovasi daerah turun. Hal ini bisa terjadi karena anggaran yang kurang, tidak sistematis dan kurang tepat sasaran. Ketika anggaran diberikan secara sistematis, tepat sasaran, dan dengan metode yang baik maka inivasi akan meningkat dengan sendirinnya.
- Dalam data setiap 5 tahun inovasi daerah mengalami penurunan, kita harus mencari penyebab apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi di 5 tahun.
- Pada Strategi dan Arah Kebijakan hanya sebagai narasi namun tidak ada wujud nyata.

- Angka kemiskinan Sumsel tertinggi kedua di Sumbagsel.

KEPALA BAPPEDA PROVINSI SUMATERA SELATAN
- Untuk melihat hasil akhir ini melalui target indikator 2030 yang dicapai. Maka data tersebut akan menjadi acuan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.3 halaman 492-dokumen RPJMD misal pada Pertumbuhan Ekonomi.
- Kondisi saat ini , Tingkat kemiskinan Sumatera Selatan 11,9% tertinggi ke 2. Maka untuk 5 tahun kedepan sudah ditetapkan target pada bab 4. Strategi di 2027 dengan Bantuan Sosial dan diakselerasi 2028-2029 di pemberdayaan/pelatihan bukan hanya Bantuan Sosial.

AYU NUR SURI , SE., MM:
- Bantuan Sosial tidak akan menekan kemiskinan. Kenapa tidak dilakukan evaluasi disetiap tahunnya?
- Pembinaan dan pelatihan harus dilaksanaan untuk menekan penurunan kemiskinan. Namun terkait ini apakah Sumatera Selatan berhasil dalam mengalokasikan anggaran .

KEPALA BAPPEDA PROVINSI SUMATERA SELATAN:
- Terkait Reformasi Birokrasi, seperti SAKIP harus mencapai A di tahun 2030.

KEPALA DINAS KOMINFO PROVINSI SUMATERA SELATAN:
- Berkaitan SPBE, optimis 2025 mengalami peningkatan. Untuk SPBE di 2026 menjadi indeks pemerintahan digital.
- Terkait infrastruktur jaringan: Jaringan menjadi kebutuhan dasar Masyarakat Sumatera Selatan. Telah berkoordinasi dengan beberapa provider, adanya bantuan gub ke kab/kota berkoordinasi menggunakan APBD.
- Terkait anggaran 2025 sangat prihatin, namun kominfo cukup optimis hal ini dikarenakan Anggaran 2026 naik menjadi 10 M, 2029 15 M, 2030 17 M.
- Urusan pemerintahan , indeks keamanan informasi anggarannya sedikit . karena ini terkait keamanan informasi Sumatera Selatan. 2026 800 jt, 2029 1 M, 2030 1,5 M. Tetapi kominfo optimis dapat melaksanakan sesuai arah kebijakan.

AYU NUR SURI , SE., MM
- Mohon dilakukan pengkajian kembali dengan anggaran jaringan yang disebutkan apakah bisa terdistribusi ke desa desa pelosok yang ada di 17 kab/kota ini. Pesimis dengan anggaran yang ada, digitisasi 17 Kabupate/kota dengan anggaran yang sama

KEPALA BAPPEDA SUMATERA SELATAN
- Usulan Anggaran berasal dari OPD masing-masing. Usulan Anggaran termasuk usulan anggaran digitisasi 17 Kabupate/kota

AYU NUR SURI , SE., MM:
- Penempatan pegawai PPPK ditempatkan tidak sesuai dengan kebutuhan OPD.

KEPALA BKD SUMATERA SELATAN
- Terkait 6 ribuan honorer Sumatera Selatan yang belum diangkat, namun telah bersurat ke BKN kemungkinan akan menjadi paruh waktu. Optimalisasi 2025 ini menjadi program BKN sehingga provinsi tidak dilibatkan dalam hal tersebut. Sehingga banyaknya ditemukan penempatan pegawai yang tidak sesuai .

PERWAKILAN KEPALA BIRO ORGANISASI

- Terkait Optimalisasi PPPK terjadi, Biro organisasi hanya memfasilitasi namun tidak melalukan eksekusi dan intervensi pada perangkat daerah sehingga biro hanya menerima data dan dikembalikan ke BKD.

ALFRENZI PANGGARBESI, S.Si

- RPJMD kebijakan politik daerah. Bagaimana visi misi kepala daerah harus didukung 3 unsur (integritas, loyalitas, Kapasitas)
- Persoalan Inovasi dan Reformasi diawali dari re-strukturisasi. Contohnya Dinas Tenaga Kerja rasio pengawas sangat rendah sehingga regulasi tidak bisa dilaksanakan dengan baik dikarenakan wilayah yang sangat luas maka pembentukan UPTD disnaker belum terlaksana.

TOYEB RAKEMBANG, S.AG

- Bagaimana bagusnya RPJMD, namun jika SDM aparatur SDM tidak ditingkatkan, Hal ini cukup pesimis untuk dicapai. Maka dibutuhkan aparat yang integritas tinggi. Aparatur yang realistis dan mumpuni yaitu dengan mencapai target harus disesuaikan juga dengan anggaran yang ada. Artinya Pelaku RPJMD perlu ditingkatkan kualitasnya.
- Untuk meningkatkan dibutuhkan pelatihan, namun ketika terkena efisiensi selalu sub kegiatan pelatihan yang dipangkas.
- Pembangunan harus memberikan pengaruh pada peningkatan pendapatan. Misalnya Pembangunan Rumah Sakit di Lubuklinggau. Ini merupakan potensi pendapatan yang bagus karena target pasarnya adalah 3 Provinsi yaitu Masyarakat Sumatera Selatan, Bengkulu dan Jambi.
- Untuk melakukan re-struktrusisasi organisasi agar melakukan *merge* OPD untuk efisiensi.

Ir.H. HENDRA GUNAWAN,SH., MM selaku Ketua Pansus

- Berikan terobosan peningkatan kinerja ASN. Misal: Memberikan laporan kinerja tiap jam selama jam kerja.

KEPALA BAPPEDA PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menanggapi Ketua Pansus 1 bahwa Ogan Ilir telah menerapkan pemberian laporan kinerja tiap ja selama jam kerja.
- Menanggapi pak rafiq bahwa Dari 12 Program /Strategis yang paling prioritas ini tidak bisa dilepas satu per satu. Misalnya Pelabuhan Tanjung Carat tetap prioritas karena merupakan simpul Sumatera Selatan, Berobat gratis tetap harus dilaksanakan, Pendidikan sesuai asacita, dan program lainnya yang harus tetap dijalankan.

KEPALA BKD PROVINSI SUMATERA SELATAN:

- Terkait SDM (banyaknya pegawai yang tidak kompeten, maka dalam RPJMD pada misi 6 . meningkatkan probabilitas ASN (Kualifikasi, konvergensi, disiplin, kinerja) yang diterbitkan BKN Sumatera Selatan.
- Terkait kinerja pegawai dimonitor melalui e-kinerja pegawai yang dilakukan penilaian disetiap bulannya. Namun aplikasi ini milik BKN.
- Terkait Disipliin pegawai melalui absensi finger print,
- Terkait kompetensi berkolaborasi Bersama BPSDM untuk pelatihan pegawai.

KEPALA BPSDM PROVINSI SUMATERA SELATAN:

- Beberapa hal yang telah di *range* terkait dukungan Pembangunan daerah didasarkan uu 20 tahun 23 ttg ASN, pasal 49 pengembangan kompetensi ASN melalui pembelajaran secara terus menerus.

- Permendagri 15 pedoman penyusunan APBD 2025, pemda pengalokasian anggaran untuk Pendidikan dan pelatihan ASN Kompetensi ASN 0,34% dari total belanja daerah prov.
- PP Nomor 17 Tahun 2020 bahwa setiap PNS mengikuti pelatihan minimal 20jp/tahun.
- Terkait sertifikasi kompetensi
- BPSDM melakukan beberapa peningkatan terdapat 61 kegiatan.
- PAD BPSDM 2025 ini 14 M sesuai yang disampaikan pada komisi 1 lalu.
- Pelaksanaan ini bersinggungan dengan penganggaran baik dikab/kota maupun provinsi.

KEPALA BIRO ORGANISASI, DIWAKILI KABAG PEMBINAAN APARATUR SEKDA:

- Pembentukan UPTD disnaker dan UPTD dinas dikab/kota yang merupakan kewenangan provinsi. Saat ini terdapat 3 dinas yang diusulkan yaitu Dinas Pendidikan, litbang, ESDM.
- Pemerintah Provinsi masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

ALFRENZI PANGGARBESI, S.Si:

- Terkait UPTD, didaerah lain telah ada cabang dinas yang mana SMA dikelola oleh Provinsi namun guru yang berada di kabupaten/kota masih harus berurusan di Provinsi dengan kata lain ke kota Palembang. Disnaker juga harus ada UPTD Pengawasan. Ada Perusahaan yang belum pernah didatangi oleh disnaker. Inspeksi bisa meningkatkan PAD.
-

Ir.H. HENDRA GUNAWAN,SH., MM selaku Ketua Pansus

- Sumsel memiliki wilayah yang sangat luas. Lakukan evaluasi untuk pembentukan UPTD untuk meningkatkan pelayanan dan dapat meningkatkan pendapatan daerah.

MUHAMMAD YANSURI, S.IP

- Biro hukum untuk melakukan terhadap Perda Perda lama terkait restribusi

KEPALA BAPPEDA PROVINSI SUMATERA SELATAN:

- Pembentukan UPTD disnaker harus dirapatkan segera antara Biro organisasi dan disnaker dan segera dimasukkan dalam RPJMD.

AYU NUR SURI , SE., MM

- Program 1 desa 1 penyuluh pertanian. Status kepegawaian penyuluh pertanian masih honor. Bagaimana status penyuluh sementara honorer sudah tidak ada rekrutmen. ?
- Penyuluh Sebagian ditarik pempus dari Pemerintah Provinsi. Bagaimana skema program tersebut?

IMAM MUSTAKIM, ST., MT

- 100rb sultan muda, dalam tata Kelola pemerintahan diampuh oleh OPD mana?
- BKD (Personil/anggota dalam OPD masih kurang. Melalui RPJMD ini kita harus mampu mendesain dari sekian banyak SDM harus maksimal. Karena bertambah banyaknya pegawai namun tidak berkompeten juga percuma.
- Dalam Program Nasional Koperasi Merah putih. Apa yang menjadi persiapan OPD / yang bisa ditangkap dan bisa dimaksimalkan dalam program ini ?

- Permohonan anggota SATPOL-PP untuk setwan provinsi Sumatera Selatan.

KEPALA BAPPEDA PROVINSI SUMATERA SELATAN:
- Menanggapi Pak Imam Mustakim, ST., MT bahwa Leading sektor di KUKM pada program 100jt sultan muda.

KASATPOL-PP:
- Menanggapi Pak Imam Mustakim, ST., MT bahwa Saat ini anggota hanya 300 anggota, standar prv: 500/700 personil. 3 pleton sianga (pengamanan demo dpr,kantor gub dan pengawalan penjagaan kegiatan prov.Sumatera Selatan).

KEPALA BIRO HUKUM PROVINSI SUMATERA SELATAN:
- Terdapat kategori kasus yang ditangani biro hukum kasus perdata, beberapa kasus berkoordinasi juga dengan jaksa.
- Kasus oleh Masyarakat miskin : KDRT juga ditangani
- Menanggapi Indeks reformasi hukum . Semua OPD harus menyampaikan pergub yang ada di OPD. Akan dikaji Kembali OPD yang bisa memberikan PAD.

KEPALA BAPPEDA PROVINSI SUMATERA SELATAN:
- 1 desa 1 penyuluh. Dalam strategi masuk namun akan dikoordinasikan Kembali kepada BKD apakah masih memungkinkan untuk dilanjutkan.atau tidak

AYU NUR SURI , SE., MM:
- Skema 1 desa 1 penyuluh harus diperhatikan kembali. Karena realita dilapangan banyaknya penempatan penyuluh pertanian yang telah diangkat tidak pada tempatnya. Penyuluh Pertanian harus melaui kompetensi Status penyuluh pertanian ini bagaimana kedepan? Apakah bisa honorer atau bagaimana? Jangan sampai melanggar aturan yang mana tidak boleh adanya rekrutmen pegawai honorer. Pastikan Kembali skema pelaksanaannya.

KEPALA BKD PROVINSI SUMATERA SELATAN:
- Menanggapi Ibu Ayu, BKD akan melakukan koordinasi kembali dengan kepala Dinas Urusan pertanian apakah penyuluh pertanian bisa dilakukan rekrutmen melalui CPNS, untuk melihat kompetensi pegawai.

KEPALA BIRO ORGANISASI, DIWAKILI KABAG PEMBINAAN APARATUR SEKDA:
- Menanggapi terkait Penyederhanan organisasi/birokrasi: Upaya perampingan struktur agar lebih efektif dan efisien.

TOYEB RAKEMBANG, S.AG:
- Penyederhanaan organisasi harus dilakukan karena seluruh Indonesia melaksanakan kecuali Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Ir.H. HENDRA GUNAWAN,SH., MM selaku Ketua Pansus
- Penyederhanaan organisasi akan menjadi perhatian namun jadwal pembahasan dan penetapan perda RPJMD harus tetap sesuai ketentuan yang berlaku.

H.Ir.MUHAMMAD F RIDHO, ST., MT selaku Wakil Ketua Pansus 1
- esensi Pembentukan Pansus ini untuk perbaikan . Organisasi tunjukan kinerja Birokrasi Organisasi, tugas bawahan memberi masukan kepada atasan. Atasan tidak akan tau tanpa adanya masukan dr bawahan

KEPALA BAPPEDA PROVINSI SUMATERA SELATAN:

- Koperasi merah putih telah dilakukan. Untuk proses legalisasi 32.708
- Strategi ada di RPJMD terkait penguatan koperasi: misi
- Perkada merah putih 17 kab sudah ada. Yang sudah pengesahan 3.2708.
- 80rb koperasi merah putih disahkan tgl 21 Juli 2025 nanti.

IV. Kesimpulan dan Tindak Lanjut : Pembahasan hasil diskusi akan ditindaklanjuti dan selanjutnya berkoordinasi Bersama OPD dengan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian Notulen ini disusun untuk dapat menjadi maklum.